

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Bila kita lihat, dalam suatu perkembangan politik di suatu negara, pasti sangat berkaitan juga dan tidak lepas dari perkembangan partai politik di suatu negara tersebut. Partai politik disini adalah sebagai salah satu instrumens pembangunan dan perkembangan perpolitikan di suatu negara. Dalam pengertian modern, partai politik adalah sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik, untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.¹ Australia, adalah salah satu negara yang bisa dikatakan mempunyai suatu perkembangan politik yang cukup cepat, karena hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya kesadaran rakyat Australia untuk ikut serta dalam partisipasi politik dan juga semakin maraknya persaingan dan kompetisi partai politik melalui kinerja mereka dalam setiap pemilihan umum yang dilaksanakan. Arti kompetisi disini adalah suatu persaingan atau suatu keadaan untuk berlomba-lomba demi untuk mendapatkan sesuatu. Jadi arti kompetisi dalam hubungannya dengan partai politik, atau dengan kata lain arti kompetisi partai politik adalah suatu persaingan partai politik yang dapat dilihat dari kinerja partai tersebut, dalam usahanya menarik atau mengumpulkan suara dari rakyat maupun masyarakat dengan cara menarik simpati mereka melalui program, isu-isu kampanye, propaganda, maupun visi misi demi untuk memenangkan pemilu atau mengalahkan lawan

¹ Dr. Ichlasul Amal, *Teori Teori Masalah Partai Politik*, DA Wacana Masyarakat, Yogyakarta, 1998, Hal

politiknya. Oleh karena itulah, hal ini sangat menarik bagi kalangan pengamat politik maupun bagi mahasiswa ilmu politik untuk menyimak dan mengikuti perkembangan tersebut.

Australia, adalah suatu negara dengan bentuk pemerintahan federal, yang menganut paham demokrasi parlementer. Negara yang terkenal dengan sebutan sebagai negara kangguru ini adalah sebuah negara multi partai, dengan dua partai besar yang menonjol dalam kehidupan politik, yaitu Partai Liberal dan Partai Buruh. Sedangkan partai yang lainnya hanyalah partai-partai kecil.

Pada tanggal 9 Oktober 2004 kemarin, negara yang berpenduduk 20 juta jiwa tersebut telah mengadakan pemilihan umum, guna untuk memilih calon perdana menteri yang baru untuk masa tiga tahun berikutnya. Persaingan sengit terjadi antara dua kubu partai besar, yaitu antara partai buruh dengan partai liberal yang berkoalisi dengan partai nasionalis. Kinerja kedua partai memang terlihat sangat bagus. Hal ini dapat terlihat dari gencarnya kampanye yang dilakukan kedua partai. Persaingan penawaran program, visi misi partai yang terlihat dari isu yang ditawarkan dan diangkat adalah salah satu bentuk persaingan dan kompetisi dari kedua partai besar Australia.

Tetapi, dalam pemilihan umum tersebut, akhirnya partai buruh mengalami kekalahan dari partai liberal yang berkoalisi dengan partai nasionalis. Di mana, koalisi partai liberal-nasional, dengan calon kandidat John Howard, memimpin kemenangannya dengan memperoleh kursi sebanyak 86 kursi, sedangkan Partai Buruh dengan calon kandidat Mark Latham hanya diimbangi dengan 77 kursi.

C. Latar Belakang Masalah

Australia adalah sebuah negara multi partai, yang memiliki dua partai besar, yaitu Partai Buruh Australia (ALP) dan Partai Liberal (LP). Persaingan ketat sering terjadi antara kedua partai ini pada setiap pemilihan umum dilaksanakan. Dengan sistem pemerintahan hasil perkawinan dari dua bentuk sistem pemerintahan, yaitu menggabungkan sistem pemerintahan parlementer yang berasal dari lembaga-lembaga politik Inggris, dan meminjam sistem federal yang dipunyai oleh Amerika Serikat (AS), membuat negara ini mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara bekas jajahan Inggris lainnya.² Negara yang berpenduduk sekitar 20 juta jiwa ini, menurut konstitusi Australia hanya mempunyai satu pemerintah nasional, yang lazimnya disebut dengan federal. Dimana negara federal ini, terbagi menjadi enam pemerintah negara bagian dan dua teritori yang secara keseluruhan membawahi 900 pemerintah lokal. Ke-enam negara bagian tersebut adalah New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania. Kemudian ke-dua teritori tersebut adalah Australian Capital Territory (ACT) dan Northern Territory (NT).

Bila kita membicarakan tentang kehidupan politik di Australia, pasti tidak akan lepas dari membicarakan suatu partai politik dan pemilihan umum. Melihat fenomena pada pemilihan umum yang dilakukan Australia pada 9 Oktober 2004 kemarin, merupakan suatu bentuk dari semakin berkembangnya kehidupan politik dari negara yang terkenal dengan sebutan negara kangguru ini. Pada pemilu yang dilaksanakan kemarin di Australia, terlihat suatu persaingan dan pertarungan yang

² Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 20.

ketat antara 2 partai besar Australia, yaitu antara Partai Buruh pimpinan Mark Latham dan Partai Koalisi Liberal-Nasional pimpinan John Howards. Dalam pemilihan umum tersebut, Partai Buruh mengalami kekalahan lagi untuk ke empat kalinya dari Partai Koalisi Liberal-Nasional.

Partai Buruh, adalah partai tertua di Australia. Partai ini berkembang dari sebuah pemogokan massal yang gagal pada permulaan tahun 1890-an.³ Akan tetapi, pada sejarah perjuangannya, Partai Buruh sering mengalami pertentangan-pertentangan di dalam tubuh partai itu sendiri. Masa tiga kali perpecahan besarnya yaitu pada tahun 1916, kemudian tahun 1929, dan tahun 1955 inilah, yang menjadikan Partai Buruh pernah menjadi oposisi dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 23 tahun, dari tahun 1950-1972.⁴ Memang, bila dilihat, perpecahan ini seakan-akan menjadi trauma tersendiri bagi Partai Buruh. Tetapi, trauma dan keterpurukannya ini, di bayar dengan kemenangan Partai Buruh pada pemilu tahun 1972, dengan pimpinan waktu itu dipegang oleh Gough Whitlam. Dan selanjutnya, antara tahun 1983-1993, partai ini terus menerus memegang pemerintahan Australia dalam periode kepemimpinan Perdana Menteri Bob Hawke, dan dilanjutkan Perdana Menteri Paul Keating, masa periode kepemimpinan 1993-1996.

Namun, kepemimpinan PM Paul Keating ini berakhir pada pemilu 1996, saat bertanding dengan calon PM John Howard dari Partai Liberal. Kekalahan Partai Buruh pada waktu itu merupakan akibat dari adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan partai oposisi mengenai kemerosotan ekonomi dan meningkatnya pengangguran pada pemerintahan Paul Keating. Kemudian dari tahun 1996, sampai

³ Richard H. Chomel dan James Sudarso, *Badang dan Politik Australia*, Yogyakarta, Yayasan

pada pemilu yang baru saja dilaksanakan kemarin, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2004, Partai Buruh dengan calon kandidat Mark Latham masih mengalami kekalahannya dari Partai Koalisi Liberal-Nasional, dibawah kepemimpinan John Howard.

Berbeda dengan Partai Liberal. partai ini dibentuk oleh anggota-anggota parlemen yang berasal dari kelompok kapitalis kelas menengah, sebagai wujud penentangan mereka terhadap keterwakilan gerakan buruh yang masuk melalui Partai Buruh dalam parlemen federal.⁵ Sebelum terbentuknya sistem kepartaian yang modern, terutama sekitar dekade pertama federasi, terdapat dua partai non buruh di dalam parlemen. Partai *Free Trade*, yang mewakili kaum konservatif, dan Partai *Proteksionis*, yang menyuarakan kaum liberal. Anggota-anggota parlemen dari kedua partai inilah yang merupakan cikal bakal dari Partai Liberal yang modern sejak tahun 1944, ketika Robert Menzies memimpin partai ini. Bila dibandingkan dengan Partai Buruh, Partai Liberal lebih lama memerintah Australia dalam masa yang cukup panjang, yaitu pernah memerintah selama 23 tahun (1949-1972), suatu rekor masa memerintah yang terpanjang dalam sejarah Australia.

Sebenarnya, pada pemilu yang baru diadakan pada 9 Oktober 2004, persaingan ketat memang terjadi antara ke dua kubu partai, antara Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional. Berbagai serangan gencar melalui kampanye terus dilakukan demi memenangkan perebutan kursi kepemimpinan dalam pemerintahan Australia. Ini yang dilontarkan kedua kandidat besar, besar berusaha untuk menarik

Apabila kita melihat pemilu sebelumnya, yaitu pemilu yang diselenggarakan pada 10 November 2001. Kedua partai tidak henti-hentinya berusaha menarik simpati para pemilih (*voters*) di Australia, baik dengan cara menawarkan berbagai macam program, visi misi partai yang terlihat dari isu yang diangkat kedua partai (Partai Buruh dan Partai Liberal), maupun dengan menampilkan kepribadian dan keunggulan dari calon kandidat kedua partai. Bagaimanapun juga, penampilan seorang kandidat dari suatu partai juga sangat berpengaruh terhadap penambahan jumlah suara pada saat pemilu dilakukan.

Saat pemilu 10 November 2001 kemarin, kekalahan yang diterima oleh Partai Buruh terlihat diluar perkiraan dan diluar dugaan. Hal ini disebabkan karena, pada saat itu, saat awal kampanye dilakukan, Partai Buruh dengan kandidat Kim Beazley mampu mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari pada partai *rival* terberatnya (Partai Liberal). Pada saat masa kampanye, sepertinya pemilihan dan pengangkatan isu yang dilakukan Partai Buruh bisa mendapatkan simpati dari masyarakat Australia. Pada saat itu, Partai Buruh yang mempunyai tradisi membangun hubungan dekatnya dengan negara tetangga, khususnya Indonesia, menjadi mempunyai tambahan nilai *plus* bagi partai tersebut, dibandingkan dengan Partai Liberal pimpinan John Howard yang lebih memusatkan perhatiannya pada hubungan luar negerinya dengan Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Kim Beazley yang lihai memainkan isu-isu domestik pada saat itu, seperti isu kesehatan, pendidikan, hubungan industrial yang lebih adil, reformasi pajak, sampai isu lingkungan hidup, juga menjadi faktor penarik simpati para pemilih Australia (*Australian voters*). Kampanyenya yang mengusung slogan "Security abroad

Security at Home", dengan tema "*A Secure Future For All Australian*", dilakukan dengan gencar dan bersemangat. Penampilannya yang lebih rileks, antusias, dan bervisi dalam memaparkan program partainya secara cukup detail dalam debat televisi, membuat peluang baginya untuk mendapatkan jumlah suara yang banyak dari para peserta pemilu 10 November 2001.

Tetapi keadaan tersebut menjadi terbalik, dari yang tadinya Partai Buruh sudah berhasil memimpin menarik simpati masyarakat Australia, arah dukungan tersebut berbalik ke arah Partai Liberal. Hal ini bisa terjadi, karena pada saat itu, ketika Partai Liberal memunculkan isu tentang mengalirnya pengungsi ilegal yang mayoritas berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Maka dari itu, posisi dan popularitas Partai Liberal menjadi naik dan membaik. Howard dengan tegas menolak sekitar 400 pendatang gelap tersebut ke Nauru, Papua Nugini dan Selandia Baru. Dan kebijakan yang dikeluarkan Howard ini mendapat dukungan dari masyarakat Australia, khususnya bagi para pekerja (kaum buruh) yang takut pekerjaannya akan terancam, karena gaji para imigran lebih rendah.

Partai Liberal mengambil slogan "*Keep Australia in The Safe Hand*" (Pertahankan Australia di Tangan yang Aman) dan *Who Will Make The Tough Decision?* (Siapa yang akan mengambil keputusan yang tepat) dengan tema *Putting Australia Interest First*. Isu imigran gelap serta terorisme, menjadi tema utama Partai Liberal. Slogan ini terbukti cukup efektif, apalagi situasi psikologis masyarakat Australia yang cenderung panik pada saat itu, dimana masyarakat Australia menginginkan keamanan untuk diri dan negaranya

Posisi Howard semakin mantap ketika ia memanfaatkan isu internasional, mengenai hal tentang serangan terorisme terhadap gedung WTC (*World Trade Center*) di Amerika Serikat, 11 September 2001 saat itu. Saat itu, John Howard langsung menyambar kesempatan tersebut untuk mendapatkan dukungan lebih banyak dari masyarakat untuk melawan keras terorisme global. Perpindahan arah dukungan para pemilih pada pemilu 2004 kemarin, disebabkan juga karena pada saat itu, Partai Buruh sama-sama memanfaatkan isu tentang munculnya imigran gelap. Sehingga saat itu, masyarakat Australia melihat kebijakan Partai Buruh ini terkesan kurang tegas, kurang kreatif, dan tidak spesifik karena cenderung menyamai kebijakan Partai Liberal yang lebih dulu mengemukakan penyelesaian dari isu tersebut. Kim Beazley dianggap tidal mampu membuat isu internasional itu lebih spesifik, sehingga kurang menarik masyarakat Australia. Karena Beazley mendukung sepenuhnya dan cenderung menyamai kebijakan Howard yang menerapkan kebijakan melawan terorisme dan pengendalian imigrasi.⁶ Maka, pada pemilu 2001 kemarin itu, kemenangan kembali diperoleh oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional pimpinan John Howard.

kinerja kedua partai dominan ini (Partai Buruh dan Partai Liberal) dalam pemilu 2001, tidak terlalu jauh berbeda dengan kinerja pada pemilu yang baru saja dilangsungkan pada 9 Oktober 2004 kemarin. Perbedaan hanya terlihat dari program, visi misi yang diangkat oleh kedua partai, dimana hal ini terlihat dari isu yang dilontarkan kedua partai besar Australia ini. Segala macam upaya dan usaha juga terus dilakukan melalui kampanye partai, demi untuk mendapatkan simpati dan

⁶ www.kompas.com, diunduh tanggal 26 Desember 2004 pukul 20.06.

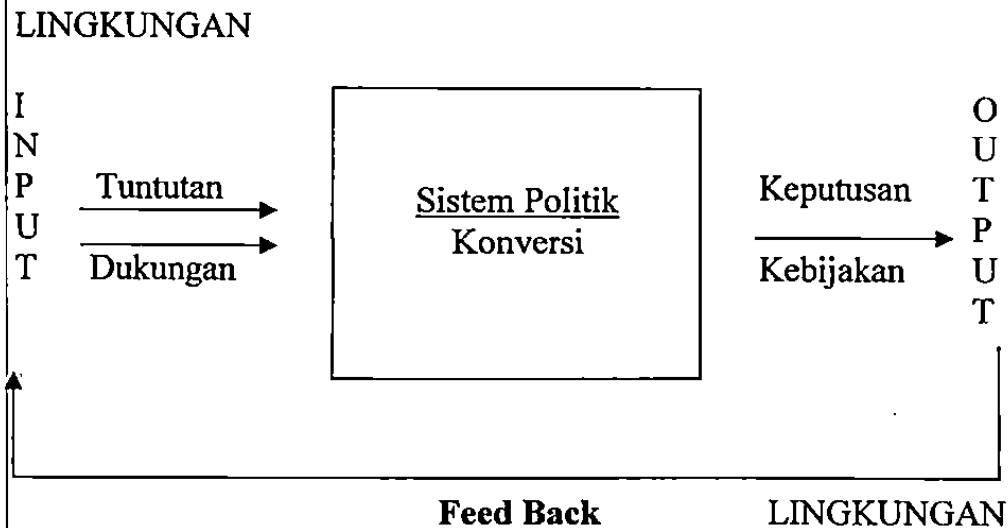
dukungan suara pada saat pemilu dilangsungkan. Keutamaan karakter kepemimpinan tokoh kandidat juga masih di ketengahkan kedua partai. Dalam pemilu kali ini (9 Oktober 2004), Partai Buruh menyiapkan calon kandidat baru, (Mark Latham). Dalam kampanye partainya, Mark Latham menjanjikan akan menarik 900 pasukan Australia yang dikirim ke Irak sebelum natal, dan Latham juga mengangkat isu tentang perbaikan hubungan luar negeri Australia dengan negara tetangganya, Indonesia. Sedangkan di pihak Partai Koalisi Liberal-Nasional, pimpinan John Howard yang sebelumnya sudah memenangkan pemilu 3 kali berturut-turut, mengangkat isu peningkatan perekonomian untuk dijadikan isu utama dari partainya. Isu terorisme, kaitannya dengan keamanan internasional pada umumnya dan nasional Australia pada khususnya, juga masih menjadi agenda utama dari partai Koalisi Liberal-Nasional. Bagi Howard, isu keamanan tetap menjadi alat utama, selain isu peningkatan perekonomian, dalam menarik simpati publik pada pemilu 2004 kemarin.

Kedua partai tidak mau melewatkan begitu saja setiap kesempatan yang ada demi untuk memenangkan pemilu kali ini (9 Oktober 2004). Dimana pada akhirnya kemenangan kembali didapatkan oleh Partai Koalisi Liberal-Nasional. Pada pemilu 2004 ini, perolehan kursi Partai Buruh di majelis rendah agak menurun. Partai Buruh hanya berhasil mendapatkan prosentase suara sebesar 47,26% suara, dengan hanya mendapatkan kursi sebanyak 60 kursi, agak menurun dari perolehan sebelumnya 64 kursi pada pemilu 2001. Sedangkan di pihak Partai Koalisi Liberal-Nasional mendapat prosentase suara 52,74% dengan perolehan kursi di majelis rendah

dan mempertahankan tampuk pemerintahan supaya dapat mendominasi adalah terletak pada bagian pemimpin berusaha mensejahterakan kehidupan rakyatnya serta kemampuan dalam tubuh partai itu sendiri.

Dengan melihat permasalahan yang sudah diangkat, maka penulis menggunakan **Teori Sistem Politik David Easton** untuk menganalisa permasalahan yang penulis angkat. Sebelum memahami proses ini, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari konsep "sistem". Secara umum, sistem sering di definisikan sebagai sekumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan dan membentuk fungsi-fungsi tertentu. Untuk melihat lebih jelas proses yang terjadi dalam sistem politik, dapat dilihat dari skema yang telah di gambarkan oleh David Easton, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Teori Sistem Politik David Easton



Sumber : Moctar Mas' oed dan Collin Macandrew, EDS, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1989 hal 5.

Sistem politik sebagai bagian dari sebuah sistem umum juga memenuhi ciri

sistem politik. Yang sering terjadi pada sistem politik adalah apabila suprastruktur atau pemerintah kurang memperhatikan tuntutan dari masyarakat. Bisa juga yang terjadi adalah ketidakmampuan aparat pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, keputusan yang di hasilkan seringkali tidak sesuai dengan tuntutan yang di inginkan oleh masyarakatnya. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya ketersumbatan keinginan masyarakat. Sebuah sistem politiiik yang dapat merespon tuntutan dari infrastruktur merupakan sistem politik yang sangat didambakan oleh banyak orang. Untuk menuju kearah keadaan yang baik itu, diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan juga keinginan baik dari aparat pemerintah yang berada dalam suprastruktur. Meskipun keputusan sistem politik biasanya bersifat otoritatif, namun keputusan itu masih tetap dapat di pertimbangkan oleh infrastruktur. Dalam hal ini, infrastruktur masih dapat memberikan respon terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Sikap infrastruktur kemudian menjadi tuntutan dan dukungan bagi suprastruktur untuk menerapkan atau merubah keputusan yang telah dikeluarkan. Selain itu, tuntutan maupun dukungan dari masyarakat itu kemudian juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menetapkan keputusan yang akan datang. Dalam tingkat itulah dikenal adanya umpan balik (*feed back*) pada sebuah sistem politik.

Dari sini, terlihat jelas bahwa pada pemilu 9 Oktober 2004 di Australia. Partai buruh mengalami kekalahan dari partai liberal, disebabkan karena tidak responnya atau kurang responsifnya Partai Buruh dalam menampung tuntutan yang di inginkan oleh masyarakat atau oleh para pemilih. Dalam hal ini, Partai Buruh kurang bisa

dalam tubuh Partai Buruh bisa dikatakan masih kurang bagus. Hal ini bisa terlihat dari kemampuan Partai Buruh dalam merespon keinginan tuntutan masyarakat Australia yang masih lemah. Proses memilah-milah kepentingan yang menghasilkan suatu isu tentang program, visi misi partai mengenai penarikan 900 personil pasukan Australia dari Irak, serta tentang program, visi, misi partai untuk mempererat dan memperbaiki hubungan Australia dengan negara Asia Tenggara, yang diangkat oleh Partai Buruh tampaknya masih kurang bisa menarik para pemilih. Respon terhadap tuntutan masyarakat Australia yang lemah ini, sepertinya juga memang ada hubungannya dengan kandidat dari Partai Buruh itu sendiri. Karena semestinya, kandidat dari Partai Buruh (Mark Latham) lebih bisa membuat suatu usulan isu yang semestinya memang banyak diminati oleh masyarakat Australia pada umumnya untuk diangkat. Sepertinya Mark Latham memang kurang lihai dalam memanfaatkan isu-isu dalam maupun luar negeri yang sedang terjadi pada waktu itu, untuk dijadikan isu utama partai. Pengalaman Mark Latham dibidang perpolitikan yang memang masih kurang, karena masih tergolong dalam politikus baru, dimana belum begitu dikenal, lantaran baru memimpin Partai Buruh hanya dalam kurun waktu 10 bulan,⁹ sepertinya juga mempengaruhi citra dari seorang kandidat. Kurang lihai nya Mark Latham dalam mengangkat isu kampanye, menyebabkan isu yang diangkat tersebut kurang bisa mengena di hati para pemilih dan kurang bisa menarik simpati masyarakat Australia pada umumnya. Sehingga para pemilihpun lari dan beralih belahan untuk memberikan suaranya pada partai yang memang lebih berpengalaman

Melihat fenomena yang terjadi pada pemilu 2004, penulis dapat mengatakan bahwa, melihat kinerja Partai Buruh yang menurun, yang dapat dilihat dari kurang responsifnya Partai Buruh terhadap tuntutan masyarakat Australia (melihat dari isu yang diangkat Partai Buruh pada pemilu 2004), serta dukungan Partai Buruh yang masih lemah, baik itu dukungan finansial, sumber dukungan massa, serta dukungan prestasi Partai Buruh yang lemah, dan juga citra kepemimpinan dari seorang kandidat, Mark Latham yang menurun, mempunyai dampak tersendiri bagi Partai Buruh. Sehingga, hal inilah yang menyebabkan Partai Buruh menerima kekalahannya lagi dalam pemilu 9 Oktober 2004.

Berbeda dengan Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional. Dalam pemilu 2004 yang baru dilakukan. Partai Koalisi Liberal-Nasional mempunyai kemampuan respon tuntutan (*demand*) yang bagus dari masyarakat Australia itu sendiri. Sepertinya, pada pemilu tahun ini, pemilih lebih tertarik kepada isu yang berkaitan dengan perekonomian dan isu-isu dalam negeri. Hal ini, diperkuat dengan adanya jajak pendapat yang dilakukan oleh televisi, sabtu 9 oktober 2004, dimana menunjukkan bahwa isu perekonomian Australia menjadi isu paling penting bagi hampir 70% pemilih.¹⁰ Dengan adanya tuntutan masyarakat yang lebih menekankan dan lebih tertarik pada masalah peningkatan perekonomian dan penanganan masalah terorisme itu, Partai Liberal bisa dengan mudah membaca keinginan dari masyarakat Australia untuk mengangkat isu tentang masalah peningkatan perekonomian Australia dan penekanan masalah keamanan untuk memberantas terorisme. Oleh karena itu, kekalahan kembali diterima Partai Buruh

Disamping teori diatas, penulis juga menggunakan teori tentang kepribadian, dimana sebelum pemilu diadakan, selain tiap partai mengadakan kampanye yang menampilkan berbagai macam isu-isu dan program, partai-partai tersebut juga menampilkan kelebihan dari masing-masing kandidatnya, baik itu dari prestasi yang pernah dicapai, kemudian juga dari sifat, perilaku maupun karakter-karakter dari seorang kandidat tersebut. Dimana **Teori Perilaku** disini adalah

“Perilaku bukanlah hasil dari perhitungan tentang tujuan dan cara mencapai dari tujuan itu, tetapi lebih merupakan akibat dari pada ciri-ciri kepribadian si pelaku politik yang terbentuk sejak masa kanak-kanaknya dan tetap melekat selama hayatnya”¹³

Dari sini terlihat bahwa karakter seorang pemimpin sangat dipentingkan sekali dalam rangka mencapai puncak kepemimpinan seperti di Australia. Sehingga seorang pemimpin harus bersih dari isu-isu tentang skandal uang, wanita, minuman keras yang bisa mengurangi rasa kewibawaan terhadap rakyatnya.

Untuk melihat perkembangan politik di Australia, maka tidak akan lepas dari sistem demokrasi yang berdasarkan pada pemilihan umum yang bersifat mutlak, dan itu adalah merupakan rangkaian dari proses politik yang didasari oleh semua orang Australia, karena mereka merasa perlu dan ikut serta di dalamnya. Hal ini sangat menentukan dalam mencari pendukung masyarakat mayoritas terhadap partai agar mereka mau mendukung dalam memenangkan pemilihan umum dan dapat berkuasa dalam pemerintahan.

John Howard juga seorang perdana menteri yang pintar dan cerdas. Hal ini terbukti ketika Howard mendapat beasiswa dari Erick Willis pada tahun terakhir

¹³ Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorinya*, Yogyakarta

mempertimbangkan hal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Australia cenderung lebih memilih Howard kembali untuk memimpin Australia.

F. Hipotesa

Dengan melihat penjabaran diatas, maka dapat ditarik suatu hipotesa bahwa :

1. Dalam pemilu tahun 2004, kinerja Partai Buruh cenderung menurun, karena:
 - a. Partai Buruh kurang responsif terhadap tuntutan dari masyarakat Australia seperti yang terlihat pada visi, misi, dan program yang kurang bisa menarik simpati masyarakat Australia tentang isu penarikan 900 personil pasukan Australia dari Irak, serta program perbaikan hubungan Australia dengan negara tetangga, khususnya Indonesia.
 - b. Dukungan finansial, serta dukungan massa yang lemah
 - c. Kepemimpinan dalam partai kandidat Mark Latham yang menurun.Sehingga hal ini menyebabkan Partai Buruh mengalami kekalahan.
2. Dalam pemilu tahun 2004, kinerja Partai Liberal cenderung meningkat, karena :
 - a. Partai Liberal lebih responsif terhadap tuntutan dari masyarakat Australia, seperti yang terlihat pada visi, misi dan program yang bisa menarik simpati masyarakat Australia tentang isu peningkatan perekonomian Australia dan menjamin keamanan Australia dari ancaman terorisme.
 - b. Dukungan finansial, serta dukungan massa yang kuat.
 - c. Kepemimpinan dalam partai kandidat John Howard yang meningkat.

Sehingga hal ini menyebabkan Partai Liberal mengalami kemenangan

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, antara lain melalui :

- 1) buku–buku ilmiah yang mendukung penulisan skripsi ini.
- 2) Surat kabar, majalah, kliping, artikel maupun jurnal–jurnal
- 3) Serta juga melalui pengumpulan data dari internet atau media elektronik lainnya.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam usahanya penulis untuk meneliti dan membuat skripsi ini agar bisa terwujud, dan serta dalam pembahasannya terlihat dengan jelas dan tidak begitu luas cakupannya, maka penulis membatasi permasalahan skripsi ini, dengan jangkauan penelitian dari masa pemilu 2001–2004. Tetapi penulis juga tidak menutup kemungkinan akan menjelaskan permasalahan di luar batasan tersebut, demi untuk memperkuat data pendukung penulisan ini agar lebih relevan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Kompetisi Partai Buruh-Partai Liberal Dalam Pemilu 2004 di Australia”, dengan tujuan penulisan untuk membandingkan prestasi, kemampuan atau kinerja dari Partai Buruh-Partai Koalisi Liberal Nasional dalam usahanya untuk memenangkan pemilu tahun 2004, serta agar bisa mengetahui dengan jelas penyebab kemenangan dan kekalahan kedua partai (Partai Buruh-Partai Liberal serta pesaingannya dalam

pemilu 2004 di Australia. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan mengenai “Bagaimanakah Persaingan Partai Buruh-Partai Liberal dalam pemilu 2004 di Australia”, dengan teori sistem politik David Easton sebagai landasan teori pada skripsi ini, guna untuk menjawab, menjelaskan, serta menganalisa permasalahan diatas. Sehingga dengan pengaplikasian teori kedalam permasalahan tersebut, penulis dapat merumuskan dan menarik suatu hipotesa, bahwa :

1. Dalam pemilu tahun 2004, kinerja Partai Buruh cenderung menurun, karena Partai Buruh kurang responsif terhadap tuntutan dari masyarakat Australia seperti yang terlihat pada visi misi, dan program yang kurang bisa menarik simpati masyarakat Australia tentang isu penarikan 900 personil pasukan Australia dari Irak, serta dari isu perbaikan hubungan Australia dengan negara tetangga, kemudian karena adanya dukungan finansial (*financial support*), serta dukungan basis massa yang lemah, dan juga karena adanya kekurangan dari kepemimpinan Mark Latham, sehingga karena hal inilah yang menyebabkan Partai Buruh mendapatkan kekalahan.
2. Dalam pemilu tahun 2004, kinerja Partai Liberal cenderung meningkat, karena Partai Liberal terlihat lebih responsif terhadap tuntutan dari masyarakat Australia, seperti yang terlihat pada visi misi dan program yang bisa menarik simpati masyarakat tentang isu peningkatan perekonomian Australia dan penanganan masalah terorisme hubungannya dengan keamanan Australia, kemudian karena adanya dukungan finansial (*financial support*), serta dukungan basis massa yang kuat, dan juga karena adanya

terhadap partai, sehingga hal inilah yang menyebabkan Partai Liberal mendapatkan kemenangan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan dengan jangkauan penelitian dari saat pemilu tahun 2001-2004, tetapi penulis juga tidak menutup kemungkinan akan menjelaskan permasalahan diluar batasan masa tersebut, demi untuk memperkuat data pendukung penulisan ini agar lebih relevan.

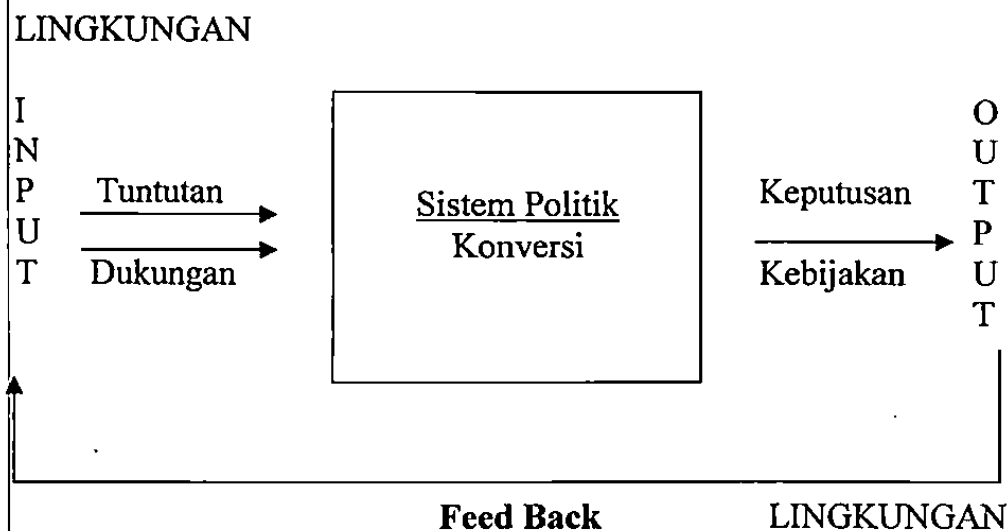
Untuk memperkuat pembuktian hipotesa diatas, maka penulis pada bagian bab II akan membahas mengenai sistem politik Australia, yang didalamnya mencakup tentang sistem pemerintahan Australia dan lembaga-lembaga negara Australia serta sistem pemilihan umum di Australia. Untuk mendukung pembuktian selanjutnya hipotesa selanjutnya, maka pada bab III penulis akan membahas permasalahan mengenai kinerja Partai Buruh, yang mencakup deskripsi umum Partai Buruh, baik itu sejarah, ideologi dan kebijakan, maupun struktur organisasi, kemudian juga membahas kinerja Partai Buruh dilihat dari isu-isu yang diangkat, baik itu isu utama maupun isu pendukung lain. Selain itu pada bab ini juga akan membahas mengenai basis dukungan finansial dan dukungan massa yang lemah, serta kekurangan dari kepemimpinan Mark Latham. Kemudian untuk pembuktian hipotesa dari bagaimanakah persaingan Partai Liberal, akan dibahas pada bab IV, dimana pada bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum dari Partai Liberal dan juga akan membahas tentang kinerja dari Partai Liberal yang berkoalisi dengan Partai Nasional, yang mencakup dari pembahasan tentang isu-isu yang diangkat, baik itu isu utama maupun isu pendukung dari Partai Koalisi Liberal-Nasional, kemudian membahas mengenai dukungan finansial maupun dukungan massa yang kuat, serta membahas

mengenai kelebihan dari citra kepemimpinan John Howard dalam partai dan juga akan disisipkan sedikit analisis perbandingan kedua partai. Dan untuk yang terakhir di bab V akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ...

dan mempertahankan tampuk pemerintahan supaya dapat mendominasi adalah terletak pada bagian pemimpin berusaha mensejahterakan kehidupan rakyatnya serta kemampuan dalam tubuh partai itu sendiri.

Dengan melihat permasalahan yang sudah diangkat, maka penulis menggunakan **Teori Sistem Politik David Easton** untuk menganalisa permasalahan yang penulis angkat. Sebelum memahami proses ini, perlu diketahui terlebih dahulu definisi dari konsep "sistem". Secara umum, sistem sering di definisikan sebagai sekumpulan beberapa elemen yang saling berhubungan dan membentuk fungsi-fungsi tertentu. Untuk melihat lebih jelas proses yang terjadi dalam sistem politik, dapat dilihat dari skema yang telah di gambarkan oleh David Easton, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Teori Sistem Politik David Easton



Sumber : Moctar Mas' oed dan Collin Macandrew, EDS, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1989 hal 5.

Sistem politik sebagai bagian dari sebuah sistem umum juga memenuhi ciri

tersebut. Dalam sistem politik juga terdapat pula beberapa elemen politik. Elemen

elemen politik itu saling berhubungan satu sama lain dalam struktur tertentu. Struktur-struktur politik itu kemudian membentuk fungsinya masing-masing. Dalam suatu sistem politik, terdapat 2 struktur utama, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur dan suprastruktur akan menjalankan fungsi Input dan Output. Proses hubungan antara input dan output ini kemudian menjadi salah satu ciri sistem politik.

Dalam wacana tentang sistem politik, infrastruktur yang menjalankan fungsi Input ini biasanya di wakili oleh kelompok masyarakat yang bukan pemerintah (*non government*). Ini berarti, dapat diperankan oleh kelompok masyarakat seperti partai politik, organisasi massa, kelompok-kelompok kepentingan dan bahkan juga individu yang memiliki kualifikasi tertentu dalam bidang politik.

Disamping infrastruktur terdapat juga suprastruktur yang menjalankan fungsi output. Singkatnya, suprastruktur adalah lembaga yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan keputusan itu bersifat otoritatif. Keputusan atau peraturan yang ditetapkan oleh suprastruktur itulah yang sering disebut output.

Dalam kaitannya dengan suprastruktur dan infrastruktur ini perlu di bedakan antara anggota individu sebagai anggota atau fungsionaris partai politik dan sebagai anggota atau pimpinan lembaga legislatif dan bahkan mungkin sebagai pejabat eksekutif dan yudisial. Jika seseorang berbicara atas nama fungsionaris partai politik, maka ia dapat digolongkan sebagai infrastruktur. Namun, jika seseorang yang sama berbicara sebagai anggota fraksi di parlemen, maka ia berbicara sebagai suprastruktur, dalam suatu ruang lingkup sistem politik.

Secara singkat, proses sistem politik dapat dimulai dari adanya input yang dijalankan oleh infrastruktur. Input ini dapat berupa tuntutan-tuntutan (*demands*) dan

sistem politik. Yang sering terjadi pada sistem politik adalah apabila suprastruktur atau pemerintah kurang memperhatikan tuntutan dari masyarakat. Bisa juga yang terjadi adalah ketidakmampuan aparat pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, keputusan yang di hasilkan seringkali tidak sesuai dengan tuntutan yang di inginkan oleh masyarakatnya. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya ketersumbatan keinginan masyarakat. Sebuah sistem politiiik yang dapat merespon tuntutan dari infrastruktur merupakan sistem politik yang sangat didambakan oleh banyak orang. Untuk menuju kearah keadaan yang baik itu, diperlukan kemampuan sumber daya manusia dan juga keinginan baik dari aparat pemerintah yang berada dalam suprastruktur. Meskipun keputusan sistem politik biasanya bersifat otoritatif, namun keputusan itu masih tetap dapat di pertimbangkan oleh infrastruktur. Dalam hal ini, infrastruktur masih dapat memberikan respon terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Sikap infrastruktur kemudian menjadi tuntutan dan dukungan bagi suprastruktur untuk menerapkan atau merubah keputusan yang telah dikeluarkan. Selain itu, tuntutan maupun dukungan dari masyarakat itu kemudian juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menetapkan keputusan yang akan datang. Dalam tingkat itulah dikenal adanya umpan balik (*feed back*) pada sebuah sistem politik.

Dari sini, terlihat jelas bahwa pada pemilu 9 Oktober 2004 di Australia. Partai buruh mengalami kekalahan dari partai liberal, disebabkan karena tidak responnya atau kurang responsifnya Partai Buruh dalam menampung tuntutan yang di inginkan oleh masyarakat atau oleh para pemilih. Dalam hal ini, Partai Buruh kurang bisa

membuat isu-isu politik yang sekiranya bisa mengena dan menarik simpati para peserta pemilu Australia. Tampaknya, tuntutan yang di inginkan masyarakat Australia pada saat pemilu 9 Oktober 2004 sebagian besar masih menginginkan dan lebih tertarik pada isu-isu tentang masalah peningkatan perekonomian dan keamanan dalam negeri Australia, dalam hubungannya dengan penanganan terorisme dewasa ini. Apalagi dengan setelah adanya peristiwa Bom Kuningan di kedubes Australia, Sehingga hal inilah yang tampaknya menyebabkan adanya kecemasan publik masyarakat Australia dalam hal masalah keamanan ini.

Dalam pemilu 9 Oktober 2004, kinerja dari Partai Buruh memang terlihat menurun. Hal ini bisa terjadi karena, pada saat masa-masa kampanye, partai ini kurang begitu bisa merespon dari keinginan dan tuntutan yang di harapkan oleh masyarakat Australia, khususnya para pemilih (*voters*). Respon yang lemah dari Partai Buruh ini dapat terlihat pada isu yang dikeluarkan atau diangkat pada saat kampanye dan saat pemilu dilaksanakan. Di pihak Partai Buruh, isu yang disampaikan kurang bisa menarik hati para pemilih atau masyarakat Australia. Isu yang disampaikan mengenai masalah penarikan pasukan Australia dari Irak dan perbaikan hubungan bilateral Australia dengan negara tetangga, khususnya Indonesia memang tidak begitu bisa menarik simpati pemilih Australia, dibandingkan dengan isu yang diangkat oleh Partai Koalisi Liberal Nasional, yang cenderung lebih bisa menarik para pemilih.

Tampaknya, Partai Buruh memang kurang bisa lebih memanfaatkan dan mengolah tuntutan serta dukungan dari keinginan masyarakat Australia itu sendiri.

Peran proses konversi (proses perubahan dari input menjadi output) yang terdapat